

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

**Penyunting:
Ujianto Singgih Prayitno**

Judul

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

iv + 122 ; Ukuran: 16 cm x 24 cm

ISBN: 978-623-6548-43-1

Cetakan Pertama, 2020

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Penulis:

Ujjianto Singgih Prayitno

Sali Susiana

Anih Sri Suryani

Lukman Nul Hakim

Sony Hendra Permana

Penyunting:

Ujjianto Singgih Prayitno

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerja sama dengan:

Intelegensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jatim

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650 Fax. 0341-588010

redaksi.intrans@gmail.com

www.intranspublishing.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSAT PENELITIAN

Setiap tahun Pusat Penelitian memberi kesempatan kepada para peneliti di lingkungan Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menerbitkan hasil kajian atau hasil penelitian mereka, salah satu buku yang diterbitkan tersebut adalah buku dengan judul Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Saya menyampaikan terima kasih kepada para penulis yang telah meluangkan tenaga dan waktunya untuk menyelesaikan proses penulisan buku ini, sehingga dapat diterbitkan dan menambah kepustakaan kita di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Semoga yang tersaji dalam buku ini dapat membantu pembaca dalam memahami segala persoalan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia.

Jakarta, September 2020

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

NIP.197111171998031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Prolog	1
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI MASA PANDEMI COVID-19	9
<i>Lukman Nul Hakim</i>	
KOMUNITAS TANGAN DI ATAS DAN KETIMPANGAN SOSIAL: PERSPEKTIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	12
<i>Ujianto Singgih Prayitno</i>	
<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> SEBAGAI SALAH SATU MEDIA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL	22
<i>Sony Hendra Permana</i>	
<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN	73
<i>Sali Susiana</i>	
KAJIAN EMPIRIS PRAKTIS CSR DALAM BIDANG LINGKUNGAN	92
<i>Anih Sri Suryani</i>	
Epilog	114
Indeks	117
Tentang Penulis	119

Prolog

Covid-19 berawal dari adanya penyakit misterius pada bulan Desember tahun 2019, bahwa ada virus “menyerupai SARS yang muncul di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, salah satu provinsi di Tiongkok, yang kemudian keberadaannya diumumkan oleh Badan Dunia untuk Kesehatan (WHO). Pada tanggal 30 Januari kemudian WHO menyatakan bahwa dunia telah dilanda pandemi Virus Corona varian baru yang kemudian diberi nama sebagai Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Hanya dalam waktu singkat, virus ini menyebar ke beberapa negara Asia, seperti Korea, Singapura, Jepang, Malaysia, Hongkong, dan Taiwan, yang kemudian menyebar secara cepat, dalam skala yang luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Dari Asia, virus ini pada akhirnya menyebar ke Benua Australia dan Eropa. Di Eropa, Italia dan Spanyol merupakan dua negara yang menyebarkan Covid-19 di hampir seluruh negara Eropa. Tidak lama setelah itu wabah ini menyeberang Samudera Atlantik menuju Benua Amerika yang kemudian menjadi pusat penyebaran baru dengan jumlah penderita mencapai ratusan ribu dan merenggut ribuan korban jiwa.

Indonesia, yang pada awalnya merasa terbebas dari Covid-19, juga tidak dapat membentengi diri dari serangan virus mematikan ini. Sejak diumumkan adanya kasus positif pertama kali oleh Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada tanggal 2 Maret 2020, Covid-19 kemudian terus menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dengan Jakarta sebagai episentrumnya. Berawal hanya ada dua kasus positif di Depok, jumlah penderita berlipat ganda menjadi ribuan dan tersebar di 34 provinsi hanya dalam durasi waktu kurang dari satu bulan. Dengan skala bencana yang begitu masif, pada tanggal 13 April presiden kemudian mengumumkan bahwa Covid-19 telah

menjadi bencana nasional melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020. Sebagai sebuah pandemi, banyak hal yang belum dipahami tentang Covid-19 ini. Bukan hanya dari aspek medis seperti: struktur virus, mekanisme penyebarannya, cara pengobatannya, cara mencegah penyebarannya, upaya untuk mengembangkan vaksin guna menangkal virus ini, dan lain-lain, namun ada banyak dimensi nonmedis yang perlu dipelajari.

Kondisi pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi, perubahan struktural ini telah mengubah norma kebiasaan dalam berinteraksi. Bersalaman yang selama ini menjadi norma pergaulan yang memperlihatkan ikatan kekerabatan menjadi tabu untuk dilakukan, menjaga jarak menjadi norma baru yang menggantikan kekerabatan dalam komunitas. Demikian pula dengan menampakkan wajah, tak lagi utuh, kita tidak lagi melihat senyum ceria yang menyertai salam tiap kali berjumpa, setiap orang diwajibkan bersembunyi dibalik masker untuk melindungi diri dan orang lain.

Demikian pula dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terus memburuk sepanjang tahun 2020 ini. Banyak ekonom yang memperkirakan angka kemiskinan pada September 2020 naik menjadi 10,34% karena dampak pandemi Covid-19 (Berita Antara, 8 September 2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase angka kemiskinan periode September 2019-Maret 2020 mencapai 9,78% atau sebesar 26,42 juta jiwa dan diperkirakan angka kemiskinan pada September 2020 naik 0,56% atau sama dengan penambahan angka kemiskinan dari periode September 2019 hingga Maret 2020 yang mencapai 1,63 juta jiwa.

Setidaknya terdapat dua sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19, yaitu dunia pendidikan dan dunia usaha. Untuk sektor pendidikan, menurut UNESCO sampai dengan 1 April 2020, berdampak terhadap setidaknya 1,5 miliar anak usia sekolah di

188 negara, dengan sekitar 68 juta di antaranya adalah anak Indonesia. Kondisi ini memaksa lebih dari 530.000 sekolah di Indonesia tutup dan mengubah metode belajar siswa dari bersifat konvensional (interaksi tatap muka antara pendidik dan peserta didik) menjadi bersifat modern yaitu berbasis teknologi komunikasi dan informasi melalui pengajaran daring (*e-learning*). Sektor kedua adalah dunia usaha, sebagai salah satu kelompok yang sangat terdampak dari pandemi Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan pengendalian Covid-19 ini sangat berdampak terhadap dunia usaha, seperti pengunjung mal yang berkurang hingga hanya 10-20% dibandingkan kondisi normal. Demikian pula dengan pengusaha bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) juga memprotes PSBB karena mengakibatkan jumlah penumpang turun drastis hingga mencapai 50%.

Dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini, siapa pun yang ingin tetap bertahan hidup perlu segera melakukan adaptasi sebagai strategi dalam mempertahankan kehidupan sosial ekonominya, dan dapat dipandang sebagai hak kebebasan setiap individu yang memungkinkan keadilan sosial dan solidaritas diterapkan. Hal ini menunjukkan pentingnya menyeimbangkan prinsip-prinsip pasar dan sosial, untuk menciptakan mekanisme perlindungan sosial di samping kekuatan pasar, yang dikontrol oleh negara. Permasalahannya adalah bagaimana menciptakan dan membangun kebijakan pembatasan sosial yang dapat diterima oleh masyarakat yang memungkinkan berbagai kekuatan dapat terfokus pada kondisi kehidupan dengan membangun perekonomian yang didorong oleh konsep moral yang kuat.

Di tengah kondisi keprihatinan ini, tampil suatu komunitas, yang disebut dengan Komunitas Tangan Di Atas, yang anggotanya terdiri dari sekelompok pengusaha UMKM yang membantu masyarakat dengan memberikan bantuan sosial. Bantuan yang mereka salurkan bukan program-program resmi yang diluncurkan

pemerintah seperti Jaring Pengaman Sosial atau Bantuan Langsung Tunai, termasuk mengamankan sektor informal yang penghasilannya mungkin tidak cukup besar, namun bantuan yang diberikan berguna untuk mengimbangi kemerosotan daya beli akibat krisis ekonomi.

Bantuan yang dilakukan oleh Komunitas Tangan Di Atas dalam memberikan bantuan sosial, tidak ubahnya seperti Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang tidak diformalkan. Mereka berjuang untuk mewujudkan keadilan sosial melalui bantuan-bantuan sosial yang mereka lakukan dan dapat dipahami sebagai upaya untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat. Hal ini merupakan pembelajaran yang berharga mengenai apa makna ketimpangan sosial dan terjadi di dimensi mana saja. Setidaknya, upaya Komunitas Tangan Di Atas merupakan suatu fenomena partisipasi masyarakat sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial serta perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan program sosial yang tepat. Mengingat ketimpangan sangat terkait dengan kohesi sosial, maka dalam upaya untuk mengubah situasi menjadi lebih baik diperlukan keterlibatan dunia usaha, tidak terkecuali UMKM.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjalankan usaha untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha perusahaan besar maupun usaha yang bergantung pada kehadiran usaha tersebut di suatu lokasi, misalnya warung kecil atau warung nasi untuk para pegawai di perusahaan tersebut. Meskipun skala kegiatan UMKM relatif kecil, namun peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia tidak dapat diabaikan. Berdasarkan dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2018 sektor UMKM menyumbang 57,17% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan 2010. Selain itu, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja yang sangat banyak, mencapai 116 juta jiwa. Sektor ini pun mampu memberikan sumbangannya terhadap ekspor Indonesia sebesar 14,37% dari total ekspor nonmigas.

Begitu besarnya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia, menjadikan sektor ini menjadi prioritas untuk dikembangkan. Namun demikian berbagai permasalahan masih dihadapi oleh sektor UMKM. Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi UMKM, yakni permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan terbesar yang memberikan kontribusi *share* dari seluruh permasalahan yang di hadapi sebesar 51,09%, selanjutnya permasalahan pemasaran sebesar 34,72%, permasalahan bahan baku sebesar 8,59%, permasalahan ketenagakerjaan sebesar 1,09%, permasalahan distribusi transportasi sebesar 0,22% dan lainnya sebesar 3,93% (Sulaeman, 2004).

Corporate Social Responsibility (CSR) yang berarti tanggung jawab sosial sebuah perusahaan terhadap *stakeholder* yang terdiri dari 3P (*Profit, People, Planet*) merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Pada intinya CSR adalah suatu konsep di mana sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat (*people*) dan kelestarian lingkungan hidup (*planet*) di sekitar mereka dengan tetap tidak lupa memperhitungkan keuntungan (*profit*) jangka panjang yang akan didapat dengan tetap memperhatikan keamanan produk dan tenaga kerja. *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Namun demikian kumpulan tulisan ini, memperlihatkan perspektif yang beragam. Pertama, UMKM dengan potensinya yang besar, baik sendiri maupun berkelompok menghimpun dana sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka. UMKM yang tergabung dalam Komunitas

Tangan di Atas (TDA) dengan tegas menolak penaturan CSR bagi mereka. Kedua CSR ormal yang dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan yang diwajibkan menyisihkan laba usahanya untuk kegiatan sosial. Kepada mereka tetap diwajibkan dalam kondisi apapun menyalurkan dana CSR mereka, termasuk untuk membantu pemerintah menanggulangi dampak Covid-19.

Program CSR ini pun tetap mempertimbangkan program pemberdayaan perempuan yang ditujukan untuk menstimulasi pengembangan usaha perempuan serta menggugah partisipasi *stakeholder* dalam pengembangan usaha perempuan dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan partisipasi masyarakat kaum perempuan dan dunia usaha dalam pengembangan perlindungan sosial melalui usaha dan sumber pembiayaan, meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan kelompok miskin di berbagai kegiatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan akses kelompok perempuan terhadap informasi, teknologi tepat guna dan berbagai sumber pembiayaan, serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan.

CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan yang ada di Indonesia sangat bervariasi, baik sektor yang disasar maupun penerima manfaat (aktor yang terlibat) dan lokasi pelaksanaannya. Terdapat beberapa kategori yang dapat digunakan untuk mengelompokkan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Antara lain yang dilakukan oleh *the La Tofi School of CSR* yang mengelompokkannya menjadi: (1) pemberdayaan ekonomi komunitas; (2) peningkatan ekonomi komunitas; (3) peningkatan mutu kesehatan; dan (4) peningkatan mutu pendidikan. Selain itu ada kategori khusus, yaitu Zamrud CSR. Dari beberapa kategori tersebut, sebagian besar kategori telah melibatkan perempuan sebagai penerima manfaat program CSR, terutama kategori pemberdayaan ekonomi komunitas, peningkatan ekonomi komunitas, dan peningkatan mutu kesehatan.

Setiap tahun the La Tofi School of CSR memberikan penghargaan berupa Nusantara CSR Awards kepada perusahaan yang dinilai berhasil melaksanakan program CSR. Berikut adalah uraian mengenai beberapa program CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada tahun 2018 yang didokumentasikan oleh *the La Tofi School of CSR* dan terdapat dalam buku *CSR untuk Komunitas: Nusantara CSR Awards 2018*. Beberapa program tersebut menysasar kepada perempuan dan terkait dengan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Demikian pula dengan Program CSR yang mengatasi persoalan lingkungan. Seiring dengan adanya isu-isu lingkungan baik itu berupa pemanasan global, perubahan iklim, maka CSR juga turut memberikan perhatian dalam upaya mengatasi kerusakan lingkungan maupun pemeliharaan lingkungan. Selain isu peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan, peningkatan usaha ekonomi, dan dukungan kesehatan. Beragam cara implementasi CSR diterapkan dengan berbagai jenis inovasinya masing-masing demi manfaat bagi lingkungan sekitar. Perusahaan yang beroperasi dengan memanfaatkan sumber daya alam lebih banyak yang melakukan upaya CSR pelestarian lingkungan untuk meminimalisir dampak kerusakan yang timbul pada kerusakan kelestarian lingkungan, yang mungkin dapat mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Apabila ekosistem terganggu dan komunitas masyarakat juga mendapat dampak buruk dari eksploitasi sumber daya alam, maka keberlangsungan industri/perusahaan tersebut juga akan terganggu.

Begitu pentingnya isu lingkungan, upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan tampaknya menjadi sebuah kebutuhan oleh perusahaan-perusahaan. Pada akhirnya timbul kesadaran bagi para

pemimpin dan pemilik perusahaan, bahwa semakin baik lingkungan sekitarnya akan semakin menggairahkan iklim bisnis dan perhatian serius kepada pelestarian lingkungan bukan merupakan ongkos, tapi investasi. Terbatasnya sumber daya alam, menyebabkan pelaku usaha juga dituntut untuk memelihara dan menggunakan sumber daya secara lebih bijak.

Epilog

Pandemi Covid-19 adalah sebuah bencana sosial yang telah mengubah norma kehidupan, tidak hanya dalam interaksi sosial mereka, tetapi juga kondisi sosial ekonomi yang bersifat masif dan global.

Bagi dunia usaha bencana ini adalah suatu keniscayaan yang dihadapi dari dua kemungkinan meraih keuntungan atau menghadapi bencana. Bagi dunia usaha yang jenis usahanya terdampak sangat buruk maka langkah terbaik adalah dengan menjadikan pegawai dan keberlangsungan perusahaan menjadi prioritas utama kebijakan. Sementara bagi perusahaan yang kondisinya lebih aman secara finansial maka masa pandemi ini adalah momen yang terbaik untuk menunjukkan kebaikan perusahaan yang orisinal.

Bencana sosial ini tidak hanya dihadapi oleh perusahaan besar, tetapi juga UMKM. Meski dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, terdapat sekelompok pengusaha yang tergabung dalam Komunitas TDA menempatkan nilai dasar yang disepakati bersama, yaitu silaturahmi, integritas, berpikiran terbuka, orientasi pada tindakan, dan keseimbangan dalam hidup, dan mengumpulkan sejumlah uang untuk kegiatan sosial mereka.

Secara tegas Komunitas TDA ini, melalui nilai yang disepakati bersama, menolak utilitarianisme sebagai paradigma individualisme radikal, yang memandang individu sebagai aktor yang berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya, yang secara rasional memilih sarana yang terbaik untuk melayani tujuan-tujuannya sendiri. Tidak dapat disangkal, bahwa dalam dunia usaha setiap pelaku usaha berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (apakah berupa kesenangan, kebahagiaan, konsumsi, atau sekadar pendapat formal tentang tujuan bersama), namun dengan tanggung jawab sosial orang mengejar sekurang-kurangnya “utilitas” moral.

Berkumpulnya individu-individu di dalam Komunitas TDA yang kompetitif, yang sama sekali tidak mengakibatkan konflik yang menyeluruh, untuk menciptakan efisiensi dan kesejahteraan maksimum.

UMKM sebagai salah satu komunitas yang umumnya ada di sekitar lokasi usaha perusahaan-perusahaan besar merupakan salah satu elemen yang perlu mendapatkan perhatian sebagai salah satu tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Tugas melakukan pemberdayaan dan pengembangan UMKM bukan hanya semata-mata tugas dari pemerintah, tetapi dari pengusaha besar juga harus ikut terlibat di dalamnya peranan UMKM yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Program pengembangan UMKM melalui CSR perusahaan besar perlu diarahkan pada, pertama, program peningkatan kualitas produk UMKM. Hal ini menjadi penting karena umumnya pelaku UMKM tidak memiliki standar kualitas yang sama sehingga kualitas produk yang dihasilkan antarpelaku usaha yang sejenis menjadi beragam. Kedua, pengembangan UMKM juga diarahkan kepada pembinaan untuk membuka akses pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Program CSR perlu difokuskan pada pelatihan bagaimana memanfaatkan *website*, media sosial, maupun melalui *e-commerce* sebagai media pemasaran. Dengan mengintegrasikan UMKM pada rantai bisnis perusahaan besar maka keberlanjutan kemitraan antara perusahaan dengan UMKM binaan akan terus berjalan karena satu sama lain akan saling membutuhkan.

Dari beberapa praktik CSR yang telah dilaksanakan memiliki kaitan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Perempuan pengusaha UMKM masih memiliki hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu berbagai hambatan tersebut juga harus diatasi, agar perempuan yang menjadi pelaku usaha sektor UMKM semakin fokus pada usahanya, termasuk adanya

pendampingan dan penguatan secara psikologis, sehingga mereka lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan mampu mengatasi kendala faktor sosial budaya yang mereka hadapi.

Sementara itu, kegiatan CSR bidang lingkungan, belum banyak diimplementasikan oleh perusahaan. Hal tersebut terjadi karena selama ini kecenderungan perusahaan dalam penyelenggaraan CSR adalah mengatasi dampak sosial dan ekonomi, program CSR yang dilakukan perusahaan lebih banyak ke dukungan infrastruktur yang jelas terlihat secara fisik, sehingga program CSR dalam mendukung kualitas lingkungan kadang terabaikan. Namun, tanpa peran serta dunia usaha dalam menjaga lingkungan maka lingkungan akan semakin rusak

Praktik CSR untuk bidang lingkungan banyak dilakukan dalam program pengelolaan sampah, baik itu dalam pembentukan komunitas pengelola sampah, dukungan kepada bank sampah, maupun dalam pengelolaan berbagai jenis sampah (sampah rumah tangga, sampah plastik, bahkan sampah B3). Bidang lainnya yang kerap menjadi fokus kegiatan CSR adalah penghematan energi. Sosialisasi dan uji coba penghematan energi dilakukan di beberapa desa percontohan. Demikian juga pembangunan alternatif energi terbarukan seperti mikrohidro telah dikembangkan dengan dukungan dana CSR di beberapa wilayah.

Kreativitas dalam perumusan program CSR bidang lingkungan sangat penting agar program yang dilakukan bisa tepat sasaran dan berkelanjutan. Bukan hanya kegiatan insidental/*incidental* yang berjalan sesaat saat dukungan dana masih mengalir. Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat perlu dibangun agar program dalam rangka kelestarian lingkungan hidup dapat terus berjalan dengan berkesinambungan.

INDEKS

C

Covid-19 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 46, 103, 115

CSR 5, 6, 7, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 26, 52, 56, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116

E

e-commerce 65, 70, 72

ekosistem 7, 94

energi 83, 102, 103, 104, 110, 111, 112, 113, 114

F

finansial 22, 40, 115

G

gender 6, 79, 80, 81, 82, 83, 84

H

hand sanitizer 19

heterogen 45

K

keagamaan 10, 44

kesukuan 44

ketenagakerjaan 5, 14, 16, 53, 76, 99

komunitas 2, 3, 5, 6, 7, 12, 20, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 57, 69, 75, 81, 82, 84, 93, 94, 104, 108, 111, 116

konservasi 102

kooperatif 45

korporasi 56, 74, 108

M

Managemen 86

Merdeka Belajar 20

O

oportunistik 45

P

pandemi 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 27, 28, 46, 115

perekonomian 3, 4, 5, 28, 38,
53, 55, 61, 62, 69, 76, 78,
88, 116

perempuan 6, 7, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
88, 89, 90, 93

perusahaan 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 33, 34, 35, 36,
37, 39, 40, 41, 42, 52, 53,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 66, 68, 69, 70, 74,
75, 76, 83, 84, 85, 86, 88,
89, 90, 93, 94, 95, 96, 97,
99, 100, 101, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 111,
114, 115, 116

Pierre Bourdieu 35, 36, 49, 50

PSBB 3, 10, 11, 17, 22, 23, 24,
103

R

rasial 44

recovery 111

S

SARS 1

sustainability 56, 111

T

thermogun 19

tradisional 33, 61, 81

U

UNESCO 2, 10

usaha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 39, 40, 41, 42, 46,
47, 48, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 66, 67, 68, 69, 70, 72,
73, 74, 75, 76, 78, 79, 83,
84, 85, 86, 88, 89, 90, 91,
93, 94, 95, 96, 97, 99, 100,
101, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111,
112, 114, 115, 116

W

website 19, 64, 70

Tentang Penulis

Prof. Dr. Ujianto Singgih Prayitno, M.Si.

Peneliti Utama IV/e Kepekaran Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan, Bidang Kepekaran Sosiologi Umum. Bidang Penelitian Struktur dan Perubahan Sosial

Lahir di Jakarta, 19 November 1964. Lulus pendidikan S1 Filsafat Univeritas Gadjah Mada, Yogyakarta (1989), pendidikan S2 Program Studi Sosiologi Universitas Indonesia (1997), dan pendidikan S3 Program Doktor Sosiologi Universitas Indonesia (2004). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain “Pencegahan Tindakan Korupsi dalam Perspektif Sosiologi”, “Konseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perspektif Sosiologi”, dan “Kearifan Lokal dan Perilaku Menyimpang: Perspektif Sosiologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”. Email: ujiantosinggihpr@yahoo.com

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

Peneliti Utama IV/e Kepekaran Studi Kemasyarakatan – Studi Khusus Gender, Bidang Kepekaran Sosiologi Pembangunan, Bidang Penelitian Peran Masyarakat Madani dan Gender dalam Pembangunan. Buku yang telah diterbitkan: (1) Perda Diskriminatif dan Kekerasan terhadap Perempuan; (2) Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif; (3) Pelindungan Perempuan Pekerja Sektor Informal

Lahir di Jakarta, 13 April 1971. Menyelesaikan pendidikan S1 Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1995) dan pendidikan S2 Kajian Wanita Universitas Indonesia (2005). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah “Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif”, “Perda Diskriminatif dan Kekerasan terhadap Perempuan” dan “Perdagangan Orang dan Perlindungan terhadap Perempuan”. Email: sali_susiana@yahoo.com

Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Peneliti Madya IV/a Kepakaran Kebijakan Lingkungan, Bidang Kepakaran Kebijakan Publik. Bidang Penelitian Kebijakan Lingkungan

Lahir di Ciamis, 14 Oktober 1975. Menyelesaikan pendidikan S1 Geofisika dan Meteorologi Institut Teknologi Bandung (1999) dan pendidikan S2 Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (2003). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah “Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Pengelola Sampah (Studi Kasus Pengelolaan Sampah di Gianyar Bali)”, “Peran Parlemen dalam Penanganan Emisi Gas Buang dari Sektor Transportasi Darat,” dan “Kontribusi CSR dalam Pengelolaan Sampah”. Email: anihss@yahoo.com

Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., M.A.

Peneliti Muda III/d Kepakaran Psikologi

Lahir di Jakarta, 26 Februari 1976. Menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi Universitas Indonesia (2002), pendidikan S2 Master of Arts in Psychology University of Jamia Milia Islamia (2007), dan pendidikan S3 Program Doktorat di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (2018). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah “Ulasan Metode Kualitatif: Wawancara terhadap Elit” dan “Meningkatkan Kualitas Perguruan Tinggi Lokal melalui Internasionalisasi Pendidikan Tinggi”. Email: luckey_knap@yahoo.com

SONY HENDRA PERMANA

Peneliti Muda III/d Kepakaran Kebijakan Ekonomi

Penulis lahir di Jakarta, 17 Februari 1981. Penulis adalah Peneliti Muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di P3DI Setjen DPR. Menyelesaikan studi S1 di Universitas Persada Indonesia YAI dan S2 di Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Kepakarannya adalah Ekonomi Terapan. Tulisan yang pernah diterbitkan dalam jurnal dan buku antara lain berjudul: “Prospek Pelaksanaan Redenominasi di Indonesia”, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan UMKM”, “Problematika dan Upaya Optimalisasi Pajak Daerah”, dan “Peran Perbankan Dalam Pembangunan Ekonomi: Sumber Pembiayaan dan Memperlancar Transaksi Pembayaran”. Mulai tahun 2011 sampai saat ini, penulis terlibat aktif dalam pembahasan RUU yang terkait dengan keuangan dan perbankan. Penulis dapat dihubungi di sony.hendra@dpr.go.id.

